



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANTONIUS PRIJADI SOESILO WIBOWO**
2. Jabatan : **WAKIL KETUA**
3. NHK : **626102**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.529.900.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/233 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.059.200.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 203 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.470.700.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	457.500.000
1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 457.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	9.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	251.722.261
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.248.522.261
III. HUTANG	Rp.	373.625.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.874.897.261

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUSILANINGTIAS**
2. Jabatan : **WAKIL KETUA**
3. NHK : **672583**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	980.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 980.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	8.000.000
1. MOTOR, YAMAHA GEAR GEAR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	40.070.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.209.814
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.030.279.814
III. HUTANG	Rp.	322.073.776
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	708.206.038

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAHYUDIN
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 546758

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 792.000.000

1. Tanah Seluas 264 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 792.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 662.185.000

1. MOTOR, HONDA NF 100 TD Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJSPO2.4L. DAKL 4X28 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 635.400.000
3. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 23.785.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 152.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 21.656.236

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 866.811.639

F. HARTA LAINNYA Rp. 10.000.000

Sub Total Rp. 2.505.152.875

III. HUTANG Rp. 1.583.881.256

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 921.271.619

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI SUPARYATI**
2. Jabatan : **WAKIL KETUA**
3. NHK : **968820**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	480.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	806.200.000
1. MOTOR, HONDA NC11CF1C AT Tahun 2013, HIBAH TANPA AKTA Rp. 7.500.000		
2. MOTOR, HONDA ACB2J21B02 AIT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
3. MOTOR, HONDA NC11D1CFAIT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.200.000		
4. MOBIL, HONDA HONDA BR-V 1,5 E CVT CRD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 146.000.000		
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ GR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 509.000.000		
6. MOBIL, SUZUKI NEW CARRY PU FDAC PS Tahun 2023, LAINNYA Rp. 135.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	84.279.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	585.437.047
F. HARTA LAINNYA	Rp.	61.738.724
Sub Total	Rp.	2.017.654.771



III. HUTANG

Rp. 414.942.700

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.602.712.071

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.